

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

---. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 1983.

Soenarto, Soerodibroto. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Roaad*. Jakarta : Raja Grafindo, 2015.

Syamsuddin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, 2013.

B. JURNAL

Busthami, Dachran. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 46, no. 4, 2018, pp. 336–42, doi:10.14710/mmh.46.4.2017.336-342.

FARIDA, S.H.I, S.H, M. .. “PENEMPATAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA IMPLEMENTASINYA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM.” *Jurnal Justiciabelen*, 2018.

Febriansyah Al Sabah AZ, Andi. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 192–211, doi:10.24252/ad.v6i1.4875.

Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al’ Adi Jurnal Hukum*, vol. IX, no. 465, 2017, pp. 106–11.

Sayogaramasatya, I. Gede, et al. “SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN KORUPSI ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, no. 1, 2021.

Universitas
Esa Unggul

Setiadi, Wicipto. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. January, 2018.

Shilby, Sunny. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1555K/PID.SUS/2019." *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 4, 2021.

Shobirin. "PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN OLEH PEJABAT NEGARA/PEMERINTAH : PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA." *Jurnal Respublica*, 2020.

Sitohang, Novitha. "Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018)." *Jurnal Hukum Adigama*, 2021.

Yuwanta, Velycia Maya. "Pemidanaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurist-Dictionurist-Diction*, vol. 2, no. 4, 2019, pp. 1479–96.

C. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA. *Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI*. 2021.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Undang Undang Republik Indonesia*, vol. 121, no. 1, 2001.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. 2004.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana*. 1999.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan*. 2010.

E. Website

Gaudensius, Suhardi. "Nenek Minah Namamu Disebut." Media Indoneisa, 2021, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut.

Masriadi, Kontributor Lhokseumawe. "Divonis Langgar UU ITE, Seorang Ibu Di Aceh Ditahan Bersama Bayinya." Kompas.Com, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/02/27/143410278/divonis-langgar-uu-ite-seorang-ibu-di-aceh-ditahan-bersama-bayinya?page=all>.